

**KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DI KELURAHAN ALAI KECAMATAN UNGAR KABUPATEN KARIMUN**

Ery Kusnadi<sup>1</sup>, Imam Yudhi Prastya<sup>2</sup>, Novi Winarti<sup>3</sup>  
erykusnadi222@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Abstract**

*The Family Hope Program (PKH) is an aid program intended for the poor. In Keluهران Alai District Ungar Karimun Regency, the Government has run and distributed PKH assistance to the community based on The Minister of Social Affairs Regulation (Permensos) Number 1 of 2018 on Family Hope Program. There are 63 Family Heads (KK) who become PKH Beneficiary Families (KPM) who get PKH channels based on their respective components. As a form of government extension, the distribution of PKH assistance is assisted by the PKH Companion. Good performance of the companion is an important point of the implementation of PKH to the community. This is because PKH companion has a role in carrying out the task of data collection and distribution of assistance. The purpose of this research is to study and explore the Performance of PKH Companion Implementation. This study uses the theory of performance assessment indicator models developed by Ripley in Purwanto and Sulistyastuti (2015: 106). This type of research is qualitative with a descriptive approach. This study found that the performance of PKH in Alai's village has not been going well. Although it has not yet reached the ideal level of its implementation, But the government continues to maximize its performance in implementing PKH to the community. The conclusion of this study is that there is still less maximum performance of PKH companion in Alai village.*

*keywords : Performance, Implementation, Family Hope Program*

**I. Pendahuluan**

Kesejahteraan merupakan pencapaian yang mesti dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keterbelakangan dan ketertinggalan pengetahuan, ilmu, teknologi, gangguan kesehatan, ketidakcukupan ekonomi dan lain sebagainya merupakan bagian dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat terutama dibidang perekonomian. Hal ini dapat memberikan dampak negatif dan keterpurukan bagi masyarakat dalam menjalankan hidup berkeluarga maupun sosial masyarakat. Salah satu yang menjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat adalah masih adanya kemiskinan, bahkan tingkat kemiskinan ini diberbagai wilayah senantiasa meningkat hingga menjadikan kelompok masyarakat tidak mampu menjalankan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berangkat dari fenomena ini, pemerintah bekerja keras untuk mencari solusi meminimalisir perkembangan kesmiskinan dilingkungan masyarakat.

Kemiskinan didefinisikan secara umum sebagai suatu kondisi saat seorang maupun sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan

yang bermartabat atau pekerjaan yang dimilikinya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan adalah standart tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi yang apabila dibandingkan dengan standart kehidupan masyarakat disekitar tempat tinggalnya.

Kemiskinan merupakan sebuah masalah serius yang sedang dialami oleh berbagai Negara dan tak terlepas Negara Indonesia juga mengalaminya. Masalah kemiskinan sudah menjadi masalah yang kompleks sehingga sebuah Negara tidak mampu mengatasi kemiskinan secara sendirian. Sebagai sebuah negara Kepulauan, Indonesia dikelilingi laut dan dua dari pertiga luas wilayah Indonesia terdiri dari lautan dengan total panjang garis pantainya sepanjang 81.000 Km, sekitar 75 % dari wilayahnya merupakan wilayah perairan dan juga merupakan salah satu terbesar di dunia ini dengan jumlah pulau lebih kurang 17.504 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km<sup>2</sup>.

Dengan wilayah laut yang luas tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar dari sektor kelautan (Hayati dan non hayati) yang sangat berlimpah dan bernilai tinggi untuk dimanfaatkan Negara untuk digunakan dan di dimanfaatkan secara optimal karena berperan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat agar semakin membaik lagi serta menghindari angka kemiskinan yang meningkat. (sumber: kementerian kelautan dan perikanan repbulik Indonesia).Kemiskinan berkaitan erat dengan kuliatas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia yang tidak berkualiatas. Kemiskinan dapat ditimbulkan karena kulaitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak menutup kemungkinan kulitas sumberdaya manusia yang rendah merupakan pemicu taraf hidup yang rendah atau kemiskinan. Untuk meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan PKH kepada masyarakat baik itu dari sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat, tentunya tidak semudah ayng diharapkan oleh masyarakat penerima PKH. Pengontrolan dan evaluasi dari pelaksanaan penyaluran PKH sangatlah perlu untuk di perhatikan, karena ini akan menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya penyaluran program bantuan tersebut kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Tabel 1.1 Daftar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karimun

NO	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah		Kenaikan Penurunan
			2011	2016	
1.	Masyarakat Miskin dengan status kesejahteraan Sumber : BDT 2015 TNP2K	KK	9.647	14.293	4.646
		Jiwa	40.439	51.983	11.544
2.	Masyarakat Miskin (Pusdatin Kemsos RI)	KK	9.647	7.823	1.828
		Jiwa	40.439	32.794	7.645
3.	Masyarakat Miskin	KK	-	14.263	-

	(BPS 2015)	Jiwa	-	57.053	-
--	------------	------	---	--------	---

Sumber : Renstra Dinsos Periode 2016-2021

Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, salah satunya dari sektor laut yang luas menjadikan Sumber Daya Alam (SDA) di bidang kelautan yang berlimpah tetapi disini masyarakat Kelurahan Alai tidak mampu mengelola hasil alam tersebut secara maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan serta kurang bijak dalam mengatur ekonomi sehingga mereka hanya bergantung pada kondisi alam dan alat tangkap yang tradisional. Sehingga tidak jarang dari mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Peran Pendamping PKH sangat penting untuk keberlangsungan proses PKH didalam masyarakat. Bertujuan membantu mensejahterakan masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang lebih baik dan Berkompeten. Melalui Kegiatan Rutin P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga). Melakukan Bimbingan/ Penyuluhan tentang materi-materi terkait Pemberdayaan Masyarakat setiap satu bulan sekali. Hal tersebut diperuntukan untuk membangun kemistri dan menjalin silaturahmi antara Pendamping dan Peserta PKH. Selain itu Pendamping juga dapat memahami Karakter dari peserta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan membantu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Pendamping sangat berpengaruh untuk Keberhasilan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Dijelaskan juga akar dari masalah ini adalah Kemiskinan yang menjadi acuan penting pokok pembahasan yang harus segera dituntaskan. Problematika ini menjadi topik yang cocok untuk mencari akar solusi dari setiap masalah yang ada dimasyarakat. Kemiskinan adalah dimana seseorang tidak dapat memenuhinya secara umum. Oleh karena itu Pemerintah membuat Program Keluarga Harapan untuk mengentas masalah Kemiskinan di dalam Masyarakat. Mulai dari pemberian Bantuan Sosial untuk masyarakat yang membutuhkan.

Pendamping membantu menggerakkan masyarakat untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik dengan adanya Program Keluarga Harapan, Sedang peserta mengikuti semua penjelasan atau panduan dari Pendamping tersebut agar memudahkan dalam mencerna materi. Kegiatan yang dilakukannya yaitu seperti, mengikuti rapat rutinan setiap 1 (satu) bulan sekali, melakukan musyawarah, diskusi, rembukan, menghormati pendapat sesama, tidak nyeleneh ketika diberikan penjelasan oleh pendamping, memperhatikan dan menerapkan, menyibukan dengan berbagai ketrampilan atau kerajinan, membangun usaha dengan hasil sisa bantuan PKH yang bisa untuk memperbaiki hidup dan menciptakan kemandirian. Memang pada dasarnya tujuan pembimbin PKH adalah untuk meningkatkan kemandirian dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari problematika kemiskinan. Sehingga kualitas masyarakat akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Maka pada penelitian ini dipandang perlu untuk peneliti melihat dan mempelajari Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun.

Implementasi merupakan bagian dari proses pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi kebijakan akan dapat dilakukan apabila telah dilakukannya perumusan-perumusan kebijakan oleh pelaksana kebijakan. Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.

Thomas R. Dye (2001) menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya (Parson, 2005: 154):

- a. Identifikasi masalah kebijakan
- b. Penyusunan agenda
- c. Perumusan kebijakan
- d. Pengesahan kebijakan

- e. Implementasi kebijakan
- f. Evaluasi kebijakan.

Menurut Ripley dalam Purwanto dan Sulisyastuti (2015:106) menggambarkan Indikator untuk penilaian pelaksanaan kebijakan dan kinerja meliputi : akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan.

Model indikator penilaian kinerja ini menurut Ripley dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:106) sebagai berikut :

- a. Akses  
Indikator Akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran.
- b. Cakupan  
Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang mudah dijangkau (mendapat pelayanan, hibah, transfer dana dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.
- c. Frekuensi  
Indikator frekuensi digunakan untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran mendapatkan layanan yang dijanjikan oleh kebijakan atau program.
- d. Bias  
Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* menerima bantuan.
- e. Ketepatan Layanan  
Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program tepat waktu atau tidak.
- f. Akuntabilitas  
Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawab atau tidak.
- g. Kesesuaian program dengan kebutuhan  
Indikator ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

### **Tujuan Penilaian Kinerja**

Dalam kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan. Dengan adanya indikator maka peneliti dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi kebijakan, program atau proyek yang telah dijalankan. Indikator juga menjadi tolak ukur perencanaan positif bagi setiap pelaksana kebijakan dengan menjadikan sebuah catatan kekurangan maupun kelebihan suatu kebijakan publik.

Penilaian kinerja pelaksanaan implementasi program, merupakan bentuk evaluasi bagi pelaksana kebijakan atau kebijakan publik yang diujukan kepada masyarakat dengan berbagai tujuan, aspek, dan keterbutuhannya. Menurut Kane dan Johnson dalam Riyanto (2006:273), kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Pendapat ini didukung oleh pernyataan Gibson dalam Achmad (2009:25) yang menyatakan bahwa kinerja tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan tersebut mengandung makna bahwa kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang

dijanjikan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat sejalan dengan tujuannya apabila adanya kesadaran bagi setiap pelaksana untuk mencapai tujuan pelaksanaan program atau proyek tersebut dengan meminimalisasikan kekurangan atau kegagalan program bagi masyarakat.

Menurut Subarsono (2016:120-122) evaluasi kinerja memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap ini lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Mengetahui apabila ada penyimpangan mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

### **Tujuan Program Keluarga Harapan**

Menurut Kementrian Sosial (2016:18), tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka waktu panjang. Tujuan khusus PKH adalah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan peserta PKH, mengarahkan perubahan perilaku positif tentang pentingnya kesehatan, pendidikan dan pelayanan yang yang memastikan kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimunserta untuk melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif sebagaimana dijelaskan Moleong (2007:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2004:11) bahwa metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun kemudian hasilnya akan dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan.

Penelitian ini berfokus pada penilaian kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun, serta peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun.

Sumber Data dalam Penelitian ini terbagi 2 yaitu Primer dan Sekunder. Data Primer yaitu data pertama yang diperoleh langsung di lapangan melalui proses observasi dan wawancara kepada informan yang dianggap dapat dipercaya kevalidan informasinya, sedangkan data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain diantaranya dari perpustakaan, catatan, dan dari instansi yang terkait, kemudian data tersebut diolah dan dijadikan data tambahan, seperti Dokumen dan Struktur instansi serta tugas Fungsinya.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Hasil Penelitian**

Kelurahan Alai merupakan salah satu kelurahan yang ada dikecamatan Ungar Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun terdiri dari 12 Kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 Desa, dengan Ibu kota Kabupaten terletak di Tanjung Balai Karimun. Dan salah satu dari 12 Kecamatan itu adalah Kecamatan Ungar yang mana Kecamatan Ungar terdiri dari 1 Kelurahan dan 3 Desa dan satu-satunya kelurahan yang ada di Kecamatan Ungar yaitu Kelurahan Alai.

Secara demografis, kependudukan di Kelurahan Alai memiliki jumlah pendudukan yang cukup padat. Penduduk merupakan sejumlah orang-orang yang menempati suatu wilayah atau daerah tertentu dengan tetap dan terus menerus. Penduduk sebagai faktor penting dari pencapaian pembangunan dan pengembangan sosail kemasyarakatan yang berkaitan terhadap kesejahteraan masyarakat, menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk berupaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan memudahkan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dalam hal ini masyarakat di Kelurahan Alai kecamatan Ungar. Selain itu, kuantitas dan kualitas penduduk sangat dituntut untuk keseimbangan pembagunanan masyarakat. Dengan diringin kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak kelurahan, kekompakkan, partisipasi dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya.

Untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun pihak Kelurahan Alai dalam menajalankan kegiatan-kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, agama dan lain sebagainya dibutuhkanlah wadah atau tempat penunjang aktivitas tersebut. Sarana/prasarana ini dapat digunakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktivitas atau kegiatan masyarakat

Guna kelancaran tugasnya seorang Lurah dibantu oleh beberapa orang staf yaitu:

- a. Sekretaris;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

## **Akses**

Kemudahan akses informasi maupun interaksi terkait penyaluran PKH ini kepada masyarakat dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh perkembangan penyaluran bantuan PKH kepada KPM PKH. Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, Kelurahan Alai merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Ungar yang menjadi sasaran pelaksanaan pemberian Program Keluarga Harapan bagi masyarakatnya. Melalui Permensos itu pula, masyarakat dilakukan pendataan untuk menentukan sasaran penerima PKH yang kemudian untuk dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

Adanya program PKH ini sangat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat Alai. Masyarakat merasa terbantu kehidupannya dengan adanya program tersebut. Program PKH yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berlangsung dan berjalan sesuai dengan tujuan adanya PKH ini yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Dengan adanya program PKH mendorong kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan masyarakat.

Selain itu, kemudahan akses yang diberikan oleh petugas PKH kepada masyarakat dapat membantu petugas PKH dalam menerima informasi, keluhan maupun masalah-masalah yang terjadi dilingkungan KPM PKH di Kelurahan Alai ini. walaupun ini telah disediakan bagi masyarakat, namun kendala-kendalanya masih dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah memberikan aduan masalah maupun keluhan serta masukan-masukan kepada pemerintah tentang penyelenggaraan PKH baik saran-saran atau kritikan. Sehingga semua informasi yang terkumpul dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana petugas PKH di Kelurahan Alai ini.

## **Cakupan**

Pemerintah dalam menyalurkan bantuan PKH tentunya telah melewati pendataan warga yang sesuai yang kemudian dianggap sebagai kategori atau indikator masyarakat penerima manfaat. Dalam pelaksanaan penyaluran PKH di Kelurahan Alai ini, masih terdapat masyarakat yang belum menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) artinya belum mendapatkan bantuan dari PKH ini. Tidak seluruh dari masyarakat di Kelurahan Alai yang masuk ke dalam kategori miskin mendapatkan bantuan PKH. Ini disebabkan oleh adanya ketidakakuratan data yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu tidak meluasnya pendataan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat miskin di Kelurahan Alai. Sehingga cakupan penyaluran inipun tidak merata baik merata sarasannya maupun merata bagi penerimanya. Hal ini menjadikan tujuan program ini di Kelurahan Alai belum dapat dikatakan maksimal pelaksanaannya, dikarenakan masih adanya penerima manfaat yang tidak mendapatkan bantuan ini. Sehingga sangat dibutuhkan kerja yang maksimal dari pemerintah untuk membuat cakupan yang lebih luas lagi baik untuk pendataan warga miskin maupun penyalurannya

Cakupan penyaluran PKH kepada masyarakat di Kelurahan Alai belum berjalan dengan baik dan memang benar adanya. Ketidaksesuaian penetapan anggota penerima bantuan PKH ini telah dirasakan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat. Dari jumlah penduduk yang tidak terlalu padat dan jarak antar rumah yang berdekatan, menjadikan masyarakat di Kelurahan Alai cukup memahami dan tahu persis bagi siapa saja yang menurut mereka pantas untuk menerima bantuan PKH tersebut. Pada prinsipnya, bantuan PKH tersebut hendaklah diberikan kepada yang membutuhkan seperti orang-orang miskin yang sakit dan tidak bisa berobat, anak-anak sekolah yang kurang mampu, lansia yang tidak mampu dan masyarakat miskin lainnya yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## **Frekuensi**

Frekuensi pelayanan merupakan tolak ukur keberhasilan dan tidak berhasilnya implementasi suatu kebijakan dari pemerintah. Salah satu dari petugas pelaksanaan PKH ialah pendamping PKH. Pendamping PKH bertugas untuk mendampingi anggota penerima PKH dalam berbagai keadaan dan

kondisi. Pendamping PKH melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Didalam pertemuan ini berbagai agenda dapat dilaksanakan seperti penyuluhan, sosialisasi, dengar pendapat, dan lain sebagainya. Selain itu pendamping PKH juga memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat KPM PKH untuk menyelesaikan isu-isu atau masalah yang timbul dan berkembang dilingkungan masyarakat terkait PKH tersebut. Memfasilitasi dan memediasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan serta keluhan KPM PKH. Pendamping PKH melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitasi akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan. Pendamping PKH juga memastikan KPM PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya.

Dari hasil wawancara peneliti bersama beberapa informan diatas mengenai kinerja pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya kepada anggota KPM PKH di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun ini. Ini menjadikan persoalan-persoalan, keluhan dan masalah lainnya yang dialami oleh KPM PKH di kelurahan Alai menjadi lamban untuk diselesaikan. Padahal, kehadiran pendamping PKH dan kinerja yang maksimal dari pendamping PKH sangat dibutuhkan oleh KPM PKH tersebut untuk membantu dan mendampingi masyarakat jika terjadi masalah dan adanya keluhan dari anggota KPM PKH di Kelurahan Alai ini. Sehingga dapat disimpulkan masih rendahnya frekuensi pelayanan dari petugas PKH bagi masyarakat penerima bantuan PKH di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun.

### **Bias**

Pembaruan data status sebagai anggota penerima bantuan PKH oleh pemerintah yang sudah dilakukan merupakan sebagai bentuk upaya konsistensi pemerintah terhadap penyaluran pemberian bantuan tersebut. Ada beberapa penyebab yang melatar belakangi diputuskannya atau dilakukannya pencabutan status sebagai anggota penerima PKH tersebut diantaranya ialah dikarenakan telah berakhirnya masa pendidikan sekolah SD, SMP maupun SMA. Telah terpenuhinya kebutuhan keluarga yang sebelumnya berasal dari keluarga tidak mampu kini telah berstatus menjadi keluarga mampu.

Dari hasil wawancara peneliti bersama para responden yang dalam hal ini masyarakat Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun sebagai informan peneliti, bahwa mengenai adanya pemutusan atau pencabutan status anggota penerima bantuan PKH bagi masyarakat Kelurahan Alai yang bukan merupakan bentuk penyimpangan (Bias) pelaksana PKH memang benar adanya.

Bantuan bagi masyarakat tidak mampu bukan hanya berasal dari bantuan PKH. Ada beberapa program bantuan lainnya dari pemerintah untuk masyarakat tidak mampu. Sehingga walaupun telah diputuskan status sebagai anggota penerima PKH tersebut, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan lainnya dari pemerintah. Pada dasarnya, pemutusan atau pencabutan status anggota penerima PKH ini telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan berdasarkan kebijakan pemerintah dengan berpedoman kepada pedoman umum pelaksanaan PKH dan Permensos RI.

### **Ketepatan Layanan**

Ketepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah menjadi bagian dari tujuan pemerintahan yang baik (*governance*). Hal ini dapat dibuktikan dengan cara dan sikap petugas PKH maupun pemerintah yang lebih tinggi diatasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik pelayanan secara administrasi maupun komunikasi dan interaksi kepada masyarakat di Kelurahan Alai.

Mengenai ketepatan layanan dari petugas PKH terhadap masyarakat penerima bantuan PKH di Kelurahan Alai kecamatan Ungar kabupaten Karimun kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan ketidak tepatan pelayanan dan kurangnya respon dari petugas PKH dalam menangani dan menganggapi persoalan-persoalan yang timbul dimasyarakat. Selain itu dengan waktu kunjungan yang tergolong jarang, menjadikan pelayanan yang diberikan oleh pelaksana PKH kepada masyarakat penerima bantuan PKH ini menjadi kurang maksimal dirajam oleh masyarakat keluarga penerima manfaat PKH di Kelurahan Alai ini.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah atau dan petugas PKH dalam mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat penerima PKH di Kelurahan Alai ini. Diketahui bahwa berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Sekretariat UPPKH Kecataman Ungar tentang Data Penerima PKH dikelurahan Alai 2021, terdapat 159 jiwa penerima manfaat dari jumlah 63 kepala keluarga miskin dikelurahan Alai. Jumlah penerima yang cukup besar untuk dibutuhkan pertanggungjawaban yang besar pula dari pemerintah dan petugas pelaksana penyaluran bantuan PKH ini kepada KPM PKH di Kelurahan Alai.

Akuntabilitas yang peneliti peroleh dari kinerja pendamping PKH ialah adanya temuan yang didapati oleh peneliti dilapangan yaitu terkait potongan jumlah bantuan PKH yang diberikan kepada masyarakat tanpa didukung oleh sosialisasi, pemberitahuan maupun ketentuan aturan yang mengatur.

### **Kesesuaian Program dengan Kebutuhan**

Kesesuaian suatu program yang dijalankan oleh pemerintah bagi masyarakat menjadi tolak ukur suatu keberhasilan pencapaian dari program tersebut. Suatu program harus dapat diterima kebermanfaatannya oleh penerima program yaitu masyarakat. Seperi halnya pelaksanaan program bantuan PKH di Kelurahan Alai ini, dari satu program PKH terdiri dari beberapa komponen yang kemudian menjadi sasaran penyaluran kepada masyarakat. Komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial dan komponen disabilitas. Masyarakat di Kelurahan Alai telah menerima bantuan PKH sesuai dengan kebutuhan komponen didalam keluarga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa informan mengenai kesesuaian pelaksanaan PKH bagi masyarakat memang dianggap baik dan sesuai. Hal ini didukung oleh penyaluran progeam yang memang disarkan atas kebutuhan masyarakat.

Dari hasil pembahasan berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa Program Kerja Harapan (PKH) di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat . Dimana masyarakat juga berharap petugas mampu memberikan solusi dan memecahkan masalah yang dihadapi.

## **2. Pembahasan**

Dari hasil pertanyaan peneliti berdasarkan indicator diketahui bahwa :

1. Akses memberikan kesamaan kedudukan kepada masyarakat, kemudahan akses yang diberikan oleh petugas PKH kepada masyarakat juga dapat membantu petugas PKH dalam menerima informasi, keluhan dan lainnya dari masyarakat.
2. Cangkupan dalam hasil survei yaitu cangkupan penyaluran tidak merata dengan baik , karena masih ada penerima manfaat yang tidak mendapatkan bantuan.
3. Frkuensi dalam hasil wawancara peneliti diketahui rendahnya frekuensi pelayanan dari petugas PKH di Kelurahan Alai.
4. Bias (penyimpangan), berkaitan dengan adanya status anggota Penerima PKH dimana diketahui bahwa pemutusan atau pencabutan status anggota PKH ini telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan berdasarkan kebijakan pemerintah.

5. Ketepatan layanan, berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat penerima bantuan PKH di Kelurahan Alai di ketahui kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan ketidak yepatan pelayanan dan kurangnya respon petugas PKH.
6. Akuntabilitas dari penelitian ini diketahui adanya temuan yang terkait potongan jumlah bantuan PKH yang diberikan kepada masyarakat tanpa didukung oleh sosialisasi, pemberitahuan maupun ketentuan aturan yang mengatur.
7. Terkait kesesuaian program dengan kebutuhan, PKH merupakan program yang tepat dan sesuai untuk membantu masyarakat miskin.

Dari hasil pembahasan berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Dimana masyarakat juga berharap petugas mampu memberikan solusi dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat di kelurahan Alai Kecamatan Ungar.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Maya Dehani, Denny hermawan, dan Irma Purmasari (2018) yang berjudul “EVALUASI PROGRAM KERJA KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR”. Dengan perbedaan peneliti yaitu pada indikator yang gunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan indikator menurut William N. Dunn (2013) yang terdiri dari :

1. Efektifitas
2. Efesiansi
3. Kecukupan
4. pemerataan
5. Responsivitas
6. Dimensi Ketepatan

#### **IV. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan pengolahan data yang peneliti peroleh dilapangan, adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama informan peneliti dan serta didukung oleh pengamatan secara langsung oleh peneliti dilapangan, maka didapati kesimpulan bahwasannya Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun belum berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat tidak maksimalnya kinerja pelaksanaan program ini terhadap masyarakat penerima PKH yaitu sebagai berikut:

1. Akses yang diberikan dan disediakan oleh pendamping untuk berkomunikasi dan berinteraksi kepada masyarakat KPM belum terbuka dengan luas.
2. Cakupan penyaluran PKH yang belum luas dan ditemukan dilapangan masih adanya keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan adanya ketidak akuratan jumlah data anggota penerima PKH yang ada di Dinas Sosial dan yang ada dilapangan.
3. Kurang maksimalnya frekuensi layanan yang diberikan pendamping kepada KPM PKH.
4. Tidak adanya terjadi bias (penyimpangan) yang berarti dilapangan. Namun berdasarkan hasil penelitian adanya ketidak akuratan dari beberapa data yang di sebabkan dari kurang maksimalnya kinerja pendamping PKH selain itu adanya temuan kasus yang diperoleh

peneliti dilapangan terkait anggota PKH yang tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagai penerima bantuan PKH.

5. Masih kurangnya ketepatan layanan yang di berikan oleh pendamping PKH kepada masyarakat KPM.
6. Akuntabilitas yang peneliti peroleh dari kinerja pendamping PKH ialah adanya temuan yang didapati oleh peneliti dilapangan yaitu terkait potongan jumlah bantuan PKH yang diberikan kepada masyarakat tanpa didukung oleh sosialisasi, pemberitahuan maupun ketentuan aturan yang mengatur.
7. Terkait kesesuaian program dengan Kebutuhan, PKH merupakan program yang tepat dan sesuai untuk membantu masyarakat miskin.

Adapun keberadaan petugas pendamping PKH sebagai penyelenggara penyaluran bantuan PKH kepada KPM PKH, belum dapat memaksimalkan kinerjanya dalam memenuhi hak masyarakat dan tugas pokok serta fungsinya dimasyarakat. Sehingga hal ini pula yang menjadi salah satu kendala bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi antar anggota penerima PKH. Selain itu dengan adanya ketidak sesuaian data penerima PKH, akurasi pendataan ulang anggota penerima PKH serta minimnya komunikasi serta informasi kepada masyarakat menunjukkan rendahnya kualitas kinerja petugas PKH dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping PKH.

## **V. Daftar Pustaka**

### **Buku**

- DR Sulistyastuti, EA Purwanto. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- Parson. (2005). Jurnal. Tahapan Proses kebijakan Publik. Diakses pada tanggal 11 oktober 2020.
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian kuanlitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2006 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2007). Jurnal. Pengertian dan Konsep Kebijakan Publik. Di akses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Sulistyastuti dan Purwanto. (2015). Jurnal. *Model indiaktor penilaian kinerja*. Diakses pada tanggal 24 Desember 2020.

### **Skripsi dan Jurnal**

- Dehani, maya Denny H dan Irma P. Jurnal Governansi. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Vol. 4:49. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020.
- Evy Septiana, Laila. (2017). 'Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Gondangrejo. Kabupaten Karanganyar.
- Isnani, Rani ; 2018. 'Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon. Kabupaten Pesawaran.
- Susanto, Herman. 2016. 'Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama. Jakarta Selatan.
- Susnaini. 2014. 'Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2013 di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang. Kabupaten Jember.

- Hertanti, Siti. Irfan Nursetiawan. R. Rindu Garvera & Asep Nurwanda (2019). Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*. Vol. 5. Nomor 3.
- Sukarna. Irman Hermadi & Yani Nurhadryani. (2021). Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berbasis Fuzzy Inference System. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (Jtiik)*. Vol.8 No. 2

### **Dokumen**

- Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 02/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2008.
- Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Periode 2016-2021
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun dalam Angka 2020

### **VI. Ucapan Terimakasih**

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, abang dan kakak serta sahabat-sahabat penulis, terimakasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Kesbangpol Kabupaten Karimun, Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaen Karimun, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Alai yang telah memberikan saya izin dan bantuan untuk saya melakukan penelitian di tempat tersebut dan telah banyak membantu serta memberi dukungan dalam hal mendapatkan data. Penulis juga menghanturkan banyak ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Imam Yudhi Prastya, S.IP., MPA. selaku pembimbing utama dan Ibu Novi Winarti, M.A selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan pembuatan artikel ini.